



BANK BAHTERAMAS BUTON
PT. BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	Jalan Protokol Lingkungan Lamandaeya Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor Telepon	0813-1138-8913
Penjelasan Umum	Tata Kelola adalah proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi atau sistem, dalam hal ini melibatkan berbagai aspek seperti pengambilan keputusan, penetapan aturan dan pengawasan kinerja. Seperti halnya BPR wajib menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan tata kelola yang baik pada BPR paling sedikit mencakup prinsip transparansi/keterbukaan, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi dan kewajaran. Dalam pelaksanaannya, BPR telah memastikan keterbukaan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan, kemudian didukung dengan sistem pelaporan yang andal dan akurat. Struktur organisasi disusun secara jelas dengan pembagian tugas dan tanggungjawab yang terukur guna meningkatkan akuntabilitas kinerja. Selain itu, perusahaan senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan manajemen risikodan pengendalian internal secara efektif. Independensi dan pengambilan keputusan juga dijaga untuk menghindari benturan kepentingan, serta menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh pihak terkait. PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA) tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan tata kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang penerapan tata kelola Bank Perekonomian Rakyat, namun masih dibutuhkan waktu dan pematapan dalam persiapan struktur dan infrastruktur agar pelaksanaannya dapat lebih baik.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	3 (cukup baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Hasil penilaian self assessment menunjukan bahwa penerapan tata kelola PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA) memiliki nilai peringkat komposit 3 (tiga) dengan predikat komposit cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal ini terdapat kelemahan penerapan tata kelola di PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA) yaitu jumlah anggota Direksi BPR yang tidak memadai dimana Direksi BPR hanya diisi 1 (satu) orang saja yaitu Direktur Operasional. Selain itu PT BPR Bahteramas Buton



BANK BAHTERAMAS BUTON
PT. BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)

	(PERSERODA) memiliki kekosongan untuk posisi Direktur Utama sekaligus Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan disebabkan karena Direktur yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari jabatannya terhitung sejak bulan mei 2020 dan sampai saat ini BPR belum memiliki pengganti untuk mengisi kekosongan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang penerapan Tata Kelola bagi BPR Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, pasal 10 ayat (2) bahwa BPR yang memiliki modal inti kurang dari RP50 Miliar (lima puluh miliar) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi dan pasal 27 ayat (2) dalam rangka memastikan kepatuhan sebagaimana dimaksud, maka BPR wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Selain itu juga PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA) juga memiliki kekosongan untuk posisi anggota Dewan Komisaris disebabkan karena anggota Dewan Komisaris telah mengundurkan diri dari jabatannya terhitung dari bulan oktober 2024 dan sampai saat ini BPR belum memiliki pengganti untuk mengisi kekosongan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, pasal 34 ayat (2) yakni BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50 Miliar (lima puluh miliar) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
--	--

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	NIK	7471051702880003
	Nama	ANWAR SA'ADAD
	Jabatan	Direktur Operasional
	Tugas dan Tanggung Jawab	1. Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan BPR; 2. Mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan operasional BPR secara menyeluruh; 3. Mengelola BRR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan; 4. Menyusun dan membuat Rencana Bisnis BPR (RBB) dan laporan realisasi RBB; 5. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Tidak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: Direksi BPR diharapkan agar lebih bekerja keras dalam menerapkan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku.		



2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	NIK	7471102405580001
	Nama	ABDUL RAZAK YUSUF
	Jabatan	Ketua Dewan Pengawas
	Tugas dan Tanggug Jawab	a. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; c. Dalam melaksanakan pengawasannya, dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR; d. Dewan komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan Keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BPR dan hal-hal ian yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.
	Rekomendasi kepada Direksi: BPR perlu adanya kelengkapan pengurus diantaranyay Direktur Utama yang sekaligus Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan agar tercipta penerapan tata kelola yang baik bagi BPR.	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggungjawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	-
	Program Kerja	-
	Realisasi	-
	Jumlah Rapat	-
2	Komite Pemantauan Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	-
	Program Kerja	-
	Realisasi	-
	Jumlah Rapat	-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	-
	Program Kerja	-
	Realisasi	-
	Jumlah Rapat	-
4	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	-
	Program Kerja	-
	Realisasi	-
	Jumlah Rapat	-
5	Komite Lainnya	



BANK BAHTERAMAS BUTON
PT. BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)

	Tugas dan Tanggung Jawab	-
	Program Kerja	-
	Realisasi	-
	Jumlah Rapat	-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Independensi Ya/Tdk
				Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunersi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	Komite Lainnya	
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	7471051702880003	ANWAR SA'ADAD	PT BPR BAHTERAMAS BUTON (PERSERODA)	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	7471102405580001	ABDUL RAZAK YUSUF	PT BPR BAHTERAMAS BUTON (PERSERODA)	-	-

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	-	Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara	PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)	70,03	60,06
2.		Kecamatan Batauga	PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)	0,16	0,16
3.		Kecamatan Siompu	PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)	0,16	0,16
4.		Kecamatan Siompu Barat	PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)	0,30	0,30
5.		Kecamatan Kadatua	PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)	0,13	0,13
6.		Kecamatan Sampolawa	PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)	0,16	0,16
7.		Kecamatan Lapandewa	PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)	0,16	0,16
8.		Kecamatan Batu Atas	PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)	0,16	0,16



BANK BAHTERAMAS BUTON

PT. BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)

9.		Kecamatan Pasarwajo	PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)	0,26	0,26
10.		Kecamatan Wolowa	PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)	0,23	0,23
11.		Kecamatan Wabula	PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)	0,23	0,23
12.		Kecamatan Kapontori	PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)	0,13	0,13
13.		Kecamatan Lasalimu	PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)	0,16	0,16
14.		Kecamatan Lasalimu Selatan	PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)	0,23	0,23
15.		Kecamatan Siotapina	PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)	0,13	0,13
16.		Kecamatan Gu	PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)	0,16	0,16
17.		Kecamatan Sangiawambulu	PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)	0,16	0,16
18.		Kecamatan Lakudo	PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)	0,16	0,16
19.		Kecamatan Mawasangka	PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)	0,16	0,16
20.		Kecamatan Mawasangka Tengah	PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)	0,16	0,16
21.		Kecamatan Mawasangka Timur	PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)	0,16	0,16
22.		Kecamatan Talaga Raya	PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)	0,16	0,16
23.		Kelurahan dan Desa Se-Kabupaten Buton, Buton Tengah dan Buton Selatan	PT BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)	36,17	36,17

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	-	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	7471051702880003	ANWAR SA'ADAD	Pada periode laporan ini Anggota Direksi BPR tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi yang lain.	Pada periode laporan ini Anggota Direksi BPR tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris.	Pada periode laporan ini Anggota Direksi BPR tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham.

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	7471102405580001	ABDUL RAZAK YUSUF	Pada periode laporan ini Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi	Pada periode laporan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota komisaris yang lain	Pada periode laporan ini anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham



BANK BAHTERAMAS BUTON

PT. BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham lain
1.	-	Pemda. Provinsi Sulawesi Tenggara	Pemegang saham Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi BPR	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham lain
2.	-	Kecamatan Batauga	Pemegang saham Kecamatan Batauga tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi BPR	Pemegang Saham Kecamatan Batauga tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham kecamatan Batauga tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham lain
3.		Kecamatan Siompu	Pemegang saham Kecamatan Siompu tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi BPR	Pemegang Saham Kecamatan Siompu tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham kecamatan Siompu tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham lain
4.		Kecamatan Siompu Barat	Pemegang saham Kecamatan Siompu Barat tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi BPR	Pemegang Saham Kecamatan Siompu Barat tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham kecamatan Siompu Barat tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham lain
5.		Kecamatan Kadatua	Pemegang saham Kecamatan Kadatua tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi BPR	Pemegang Saham Kecamatan Kadatua tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham kecamatan Kadatua tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham lain
6.		Kecamatan Sampolawa	Pemegang saham Kecamatan Sampolawa tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi BPR	Pemegang Saham Kecamatan Sampolawa tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham kecamatan Sampolawa tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham lain
7.		Kecamatan Lapandewa	Pemegang saham Kecamatan Lapandewa tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham Kecamatan Lapandewa tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan komisaris BPR	Pemegang saham kecamatan Lapandewa tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham lain
8.		Kecamatan Batu Atas	Pemegang saham Kecamatan Batu Atas tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota	Pemegang saham Kecamatan Batu Atas tidak memiliki hubungan	Pemegang saham kecamatan Batu Atas tidak memiliki hubungan



BANK BAHTERAMAS BUTON

PT. BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)

			Direksi BPR	keuangan dengan anggota Dewan Komisaris BPR	keuangan dengan pemegang saham lain
9.		Kecamatan Pasarwajo	Pemegang saham kecamatan Pasarwajo tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham Kecamatan Pasarwajo tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham kecamatan Pasarwajo tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham lain
10.		Kecamatan Wolowa	Pemegang saham kecamatan Wolowa tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham Kecamatan Wolowa tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham kecamatan Wolowa tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham lain
11.		Kecamatan Wabula	Pemegang saham kecamatan Wabula tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham Kecamatan Wabula tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham kecamatan Wabula tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham lain
12.		Kecamatan Kapontori	Pemegang saham kecamatan Kapontori tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham kecamatan Kapontori tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham kecamatan Kapontori tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham lain
13.		Kecamatan Lasalimu	Pemegang saham kecamatan Lasalimu tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham kecamatan Lasalimu tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham kecamatan Lasalimu tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham lain
14.		Kecamatan Lasalimu Selatan	Pemegang saham kecamatan Lasalimu Selatan tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham kecamatan Lasalimu Selatan tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham kecamatan Lasalimu Selatan tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham lain
15.		Kecamatan Siotapina	Pemegang saham kecamatan Siotapina tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham kecamatan Siotapina tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham kecamatan Siotapina tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham lain
16.		Kecamatan Gu	Pemegang saham kecamatan Gu tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi BPR	Pemegang Saham kecamatan Gu tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham kecamatan Gu tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham lain



BANK BAHTERAMAS BUTON

PT. BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)

17.		Kecamatan Sangiawambulu	Pemegang saham kecamatan Sangiawambulu tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi BPR	Pemegang Saham kecamatan Sangiawambulu tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham kecamatan Sangiawambulu tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham lain
18.		Kecamatan Lakudo	Pemegang saham kecamatan Lakudo tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi BPR	Pemegang Saham kecamatan Lakudo tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham kecamatan Lakudo tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham lain
19.		Kecamatan Mawasangka	Pemegang saham kecamatan Mawasangka tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham kecamatan Mawasangka tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham kecamatan Mawasangka tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham lain
20.		Kecamatan Mawasangka Tengah	Pemegang saham kecamatan Mawasangka Tengah tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham kecamatan Mawasangka Tengah tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham kecamatan Mawasangka Tengah tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham lain
21.		Kecamatan Mawasangka Timur	Pemegang saham kecamatan Mawasangka Timur tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham kecamatan Mawasangka Timur tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham kecamatan Mawasangka Timur tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham lain
22.		Kecamatan Talaga Raya	Pemegang saham kecamatan Talaga Raya tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham kecamatan Talaga Raya tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham kecamatan Talaga Raya tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham lain
23.		Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Buton, Buton Tengah dan Buton Selatan	Pemegang saham kelurahan dan Desa se-Kabupaten Buton, Buton Tengah dan Buton Selatan tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham kelurahan dan Desa se-Kabupaten Buton, Buton Tengah dan Buton Selatan tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham tid kelurahan dan Desa se-Kabupaten Buton, Buton Tengah dan Buton Selatan ak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham lain

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	7471051702880003	ANWAR SA'ADAD	Pada periode laporan ini Anggota Direksi BPR tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi yang lain.	Pada periode laporan anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pada periode laporan anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham BPR

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham Lain
1.	7471102405580001	ABDUL RAZAK YUSUF	Pada periode laporan ini Anggota Dewan Komisaris BPR tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi yang lain.	Pada periode laporan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris BPR yang lain	Pada periode laporan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham lain BPR

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham Lain
1.	-	Pemda. Provinsi Sulawesi Tenggara	Pemegang saham Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memiliki hubungan keluarga	Pemegang saham Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memiliki hubungan keluarga	Pemegang saham Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memiliki hubungan keluarga



BANK BAHTERAMAS BUTON

PT. BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)

			dengan anggota Direksi BPR	dengan anggota Dewan Komisaris BPR	dengan pemegang saham lain BPR
2.	-	Kecamatan Batauga	Pemegang saham Kecamatan Batauga tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham Kecamatan Batauga tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham Kecamatan Batauga tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lain BPR
3.	-	Kecamatan Siompu	Pemegang saham Kecamatan Siompu tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham Kecamatan Siompu tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham Kecamatan Siompu tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lain BPR
4.	-	Kecamatan Siompu Barat	Pemegang saham Kecamatan Siompu Barat tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham Kecamatan Siompu Barat tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham Kecamatan Siompu Barat tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lain BPR
5.		Kecamatan Kadatua	Pemegang saham Kecamatan Kadatua tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham Kecamatan Kadatua tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham Kecamatan Kadatua tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lain BPR
6.	-	Kecamatan Sampolawa	Pemegang saham Kecamatan Sampolawa tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham Kecamatan Sampolawa tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham Kecamatan Sampolawa tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lain BPR
7.	-	Kecamatan Lapandewa	Pemegang saham Kecamatan Lapandewa tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham Kecamatan Lapandewa tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham Kecamatan Lapandewa tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lain BPR
8.	-	Kecamatan Batu Atas	Pemegang saham Kecamatan Batu Atas tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham Kecamatan Batu Atas tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham Kecamatan Batu Atas tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lain BPR
9.	-	Kecamatan Pasarwajo	Pemegang saham Kecamatan Pasarwajo tidak memiliki hubungan	Pemegang saham Kecamatan Pasarwajo tidak memiliki hubungan	Pemegang saham Kecamatan Pasarwajo tidak memiliki hubungan



BANK BAHTERAMAS BUTON

PT. BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)

			keluarga dengan anggota Direksi BPR	keluarga dengan anggota Dewan Komisaris BPR	keluarga dengan pemegang saham lain BPR
10.	-	Kecamatan Wolowa	Pemegang saham Kecamatan Wolowa tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham Kecamatan Wolowa tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham Kecamatan Wolowa tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lain BPR
11.	-	Kecamatan Wabula	Pemegang saham Kecamatan Wabula tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham Kecamatan Wabula tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham Kecamatan Wabula tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lain BPR
12.	-	Kecamatan Kapontori	Pemegang saham Kecamatan Kapontori tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham Kecamatan Kapontori tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham Kecamatan Kapontori tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lain BPR
13.		Kecamatan Lasalimu	Pemegang saham Kecamatan Lasalimu tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham Kecamatan Lasalimu tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham Kecamatan Lasalimu tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lain BPR
14.	-	Kecamatan Lasalimu Selatan	Pemegang saham Kecamatan Lasalimu Selatan tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham Kecamatan Lasalimu Selatan tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham Kecamatan Lasalimu Selatan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lain BPR
15.	-	Kecamatan Siotapina	Pemegang saham Kecamatan Siotapina tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham Kecamatan Siotapina tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham Kecamatan Siotapina tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lain BPR
16.	-	Kecamatan Gu	Pemegang saham Kecamatan Gu tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham Kecamatan Gu tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham Kecamatan Gu tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lain BPR
17.	-	Kecamatan Sangiawambulu	Pemegang saham Kecamatan Sangiawambulu tidak memiliki	Pemegang saham Kecamatan Sangiawambulu tidak memiliki	Pemegang saham Kecamatan Sangiawambulu tidak memiliki



BANK BAHTERAMAS BUTON

PT. BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)

			hubungan keluarga dengan anggota Direksi BPR	hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris BPR	hubungan keluarga dengan pemegang saham lain BPR
18.	-	Kecamatan Lakudo	Pemegang saham Kecamatan Lakudo tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham Kecamatan Lakudo tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham Kecamatan Lakudo tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lain BPR
19.	-	Kecamatan Mawasangka	Pemegang saham Kecamatan Mawasangka tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham Kecamatan Mawasangka tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham Kecamatan Mawasangka tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lain BPR
20.	-	Kecamatan Mawasangka Tengah	Pemegang saham Kecamatan Mawasangka Tengah tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham Kecamatan Mawasangka Tengah tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham Kecamatan Mawasangka Tengah tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lain BPR
21.	-	Kecamatan Mawasangka Timur	Pemegang saham Kecamatan Mawasangka Timur tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham Kecamatan Mawasangka Timur tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham Kecamatan Mawasangka Timur tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lain BPR
22.	-	Kecamatan Talaga Raya	Pemegang saham Kecamatan Talaga Raya tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham Kecamatan Talaga Raya tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham Kecamatan Talaga Raya tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lain BPR
23.	-	Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Buton, Buton Tengah dan Buton Selatan	Pemegang saham Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Buton, Buton Tengah dan Buton Selatan tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi BPR	Pemegang saham Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Buton, Buton Tengah dan Buton Selatan tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang saham Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Buton, Buton Tengah dan Buton Selatan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lain BPR



BANK BAHTERAMAS BUTON
PT. BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)

G. PAKET/ KEBIJAKAN DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji Pokok	1	95.040.000,-	1	51.701.760,-
2.	Tunjangan	1	98.255.441,-	1	4.308.480,-
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi Berbasis Saham				
5.	Remunerasi Lainnya		31.440.734,-		
	Total Remunerasi		224.736.175,-		56.010.240,-
	Jenis Fasilitas Lain				
1.	Perumahan	1	15.000.000,-	-	-
2.	Transportasi	0	0	-	-
3.	Asuransi Kesehatan	1	6.362.964,-	-	-
4.	Fasilitas Lainnya	0		-	-
	Total Fasilitas Lainnya		21.362.964,-		-
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		246.099.139,-		50.010.240,-

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai terendah (b)	2,66
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,65
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,37

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	13/10/2025	14	Kredit macet dan arahan untuk pejabat dan manager
2.	30/12/2025	6	Realisasi pencapaian Target Rencana Bisnis BPR

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
-----	-----	------------------------------	---------------------	-------------------



BANK BAHTERAMAS BUTON
PT. BPR Bahteramas Buton (PERSERODA)

					(dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	7471102405580001	ABDUL RAZAK YUSUF	1	1	100,00

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 Tahun)	Jumlah Kassu (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Lapaoran	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Prose Penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1.	25/7/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan Anggota Pramuka Tuna Rungu	Panitia Penyelenggara	-	200.000,-
2.	31/7/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan Lomba Gerak Jalan Indah	Panitia Penyelenggara	-	300.000,-
3.	1/8/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan Duka Cita	Panitia Penyelenggara	-	1.000.000,-
4.	17/10/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan Sponsorship kegiatan turnamen futsal	Panitia Penyelenggara	-	1.000.000,-
5.	29/10//2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan Kegiatan turnamen futsal	Panitia Penyelenggara	-	1.000.000,-
6.	21/10/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan kegiatan turnamen bola volly	Panitia Penyelenggara	-	1.000.000,-
7.	23/10/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan Duka Cita	Panitia Penyelenggara	-	500.000,-
8.	28/11/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan Dana Kegiatan civfest hmts ke-24	Panitia Penyelenggara	-	500.000,-
9.	28/11//2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan kegiatan turnamen futsal	Panitia Penyelenggara	-	500.000,-

Pasarwajo, 29 April 2026

PT BPR BAHTERAMAS BUTON (PERSERODA),


DASNUR
Direktur Utama


PT BPR BAHTERAMAS BUTON (PERSERODA)


ANWAR SA'ADAD
Direktur Operasional